



LAPORAN KINERJA



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai visi misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 pada prinsipnya adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANDan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan petunjuk teknis dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 adalah sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja organisasi atas pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan pada awal tahun anggaran 2022.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara ini menjadi alat bantu untuk mengevaluasi kinerja selama tahun anggaran 2022, sehingga kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di waktu mendatang diharapkan akan menjadi lebih baik.

Medan, Februari 2023

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ir. Aspan Sofian, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
19630313 199103 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	4
BAB II	10
2.1 Visi dan Misi	10
2.2 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target-Target Tahun 2022	14
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
BAB III	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
BAB IV	46
4.1 Kesimpulan	46

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional yang strategis, pengelolaan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang baik dan didukung oleh aparatur negara yang profesional, akuntabel dan bebas KKN.

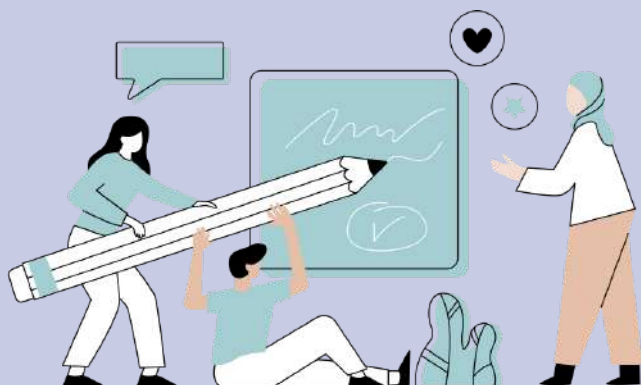
Agar penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan berjalan baik dan memenuhi harapan masyarakat umum, maka perlu dilakukan upaya untuk menciptakan kinerja yang optimal dan sesuai tujuan pembangunan nasional, sehingga melatarbelakangi setiap Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) setiap 5 (lima) tahun sekali sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk tingkat Pemerintahan di Daerah adalah Rencana Pembangunan.



BAB I PENDAHULUAN

Sedangkan untuk tingkat Pemerintahan di Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah. Sehingga dengan adanya RPJMD dijabarkan pada RENSTRA, yang bertujuan agar Rencana Pembangunan dapat dicapai secara objektif, terukur, tepat sasaran dan tepat waktu. Selanjutnya RPJMD dan RENSTRA dijabarkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) pada setiap tahun guna menentukan dan melaksanakan prioritas pembangunan yang menjadi tuntunan dan harapan masyarakat. Sedangkan hasil yang diperoleh atas pencapaian sasaran, akan menjadi data kinerja yang dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) setiap Instansi Pemerintah tiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 pada prinsipnya adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



BAB I PENDAHULUAN

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 adalah sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja organisasi atas pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan pada awal tahun anggaran 2022.

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Review atas Laporan Kinerja, maka Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggung jawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam Laporan Kinerja ini terdapat instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.



BAB I PENDAHULUAN

1.3 TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 42 Tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi.

Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi;

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan kebijakan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Penyelenggaraan administrasi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya





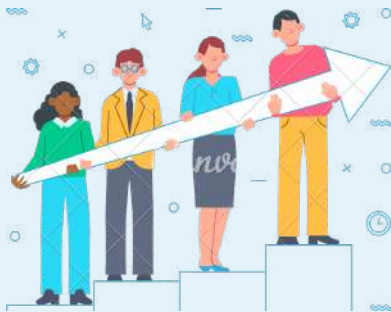
Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dibantu:

a. Sekretariat;

- Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Subbagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
- Subbagian Keuangan

b. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;

- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Ikan
- Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Seksi Pembinaan Usaha Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



c. Bidang Perikanan Tangkap;

- Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap
- Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Tangkap Ikan
- Seksi Pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan dan Kenelayanan.



d. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Seksi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Sumber daya Pengawasan Perikanan Tangkap
- Seksi Pembinaan Usaha Kawasan Pesisir dan pulau - pulau Kecil.


```

graph TD
    Manager((Manager)) --- Team1[Team Member 1]
    Manager --- Team2[Team Member 2]
    Manager --- Team3[Team Member 3]
  
```

-

SUMBER DAYA MANUSIA



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara di dukung oleh ketersediaan sumberdaya aparatur sebanyak 130 Orang (Seratus Tiga Puluh) orang, yang terdiri dari:



1. SD sebanyak 2(dua) orang
2. SLTP sebanyak 6 (Enam) orang
3. SLTA sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) Orang
4. D-3, D-2, D-1 sebanyak 8 (delapan) orang
5. Sarjana (S-1)/ Sederajat sebanyak 64 (enam puluh empat) orang
6. Pasca Sarjana (S-2) sebanyak 17 (tujuh belas) orang

Sedangkan jumlah ASN berdasarkan golongan adalah:

1. Golongan I sebanyak 2 (dua) orang
2. Golongan II sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang
3. Golongan III sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang
4. Golongan IV sebanyak 17 (tujuh belas) orang

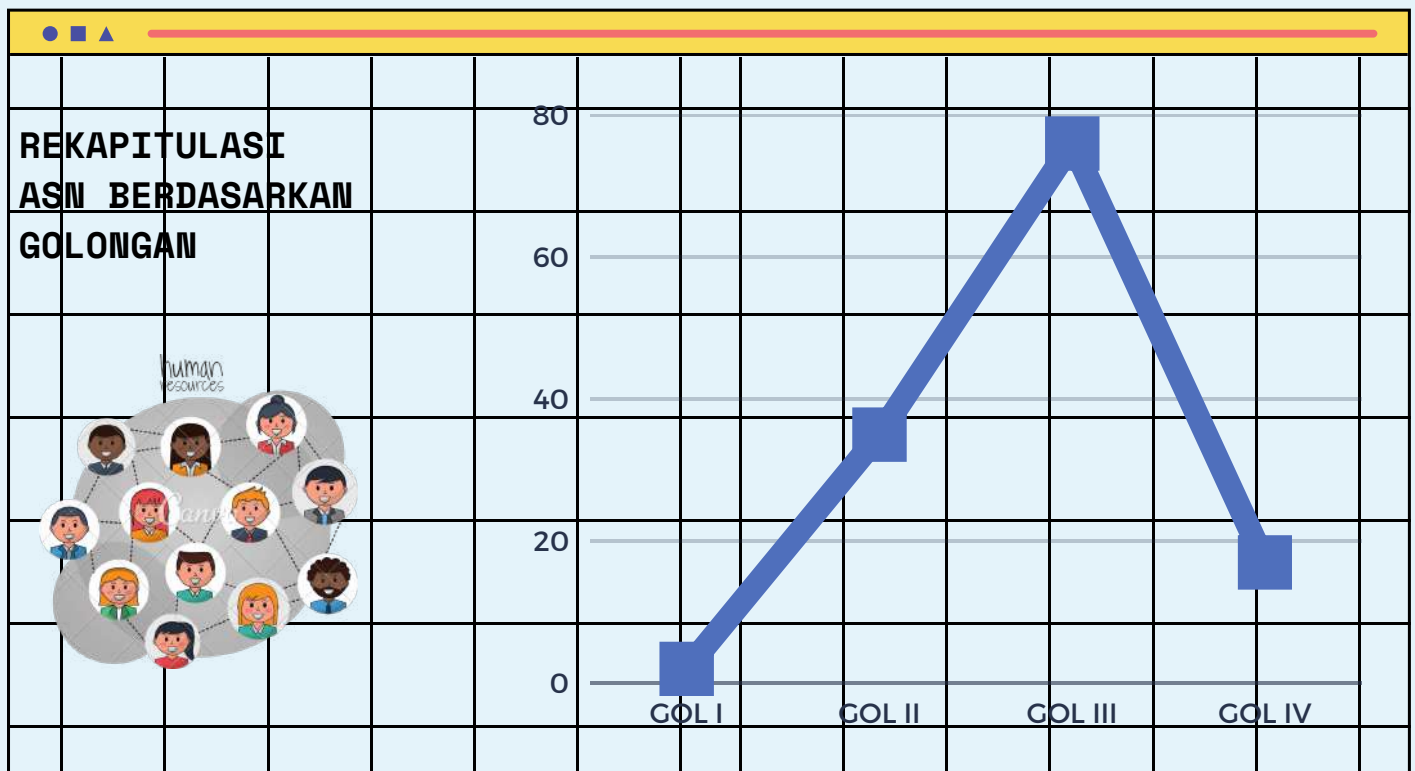
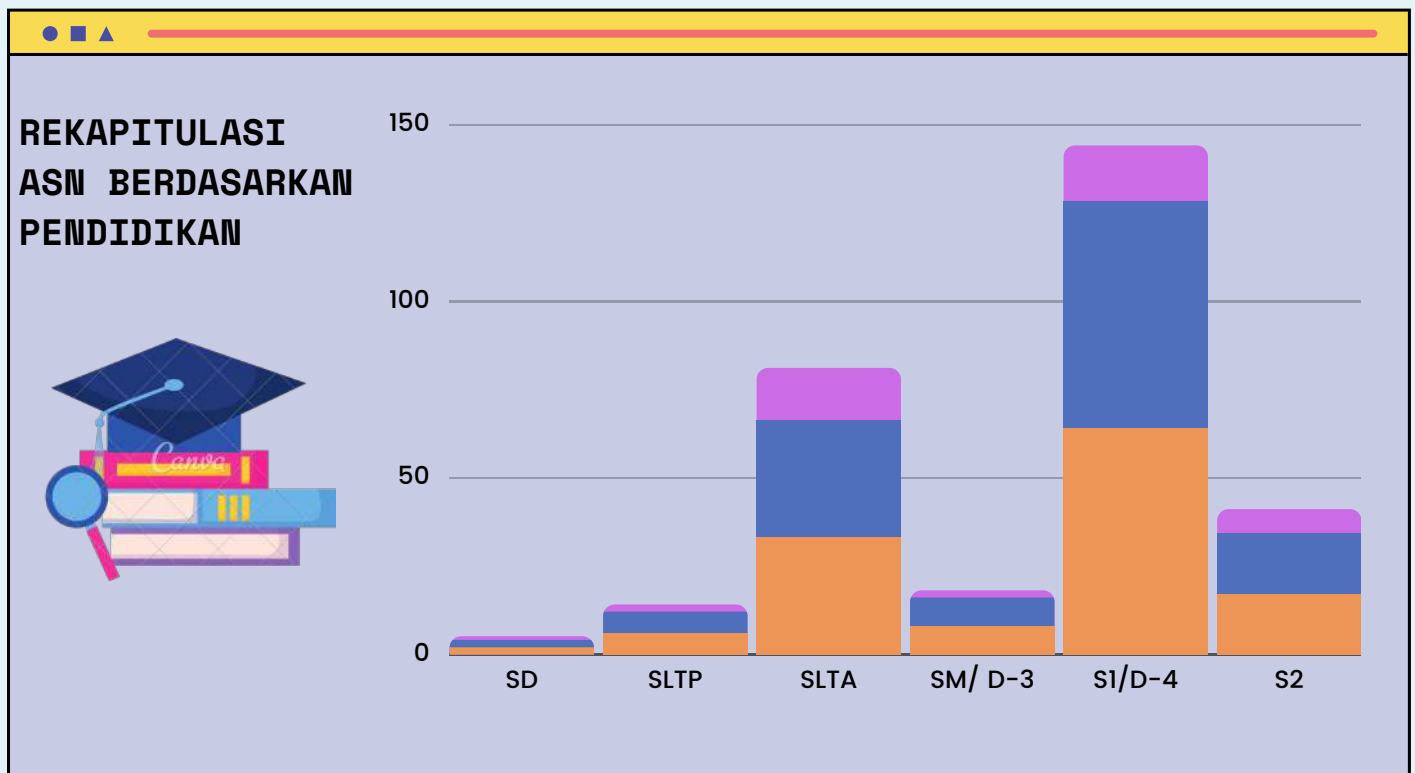
per 31 Desember 2022



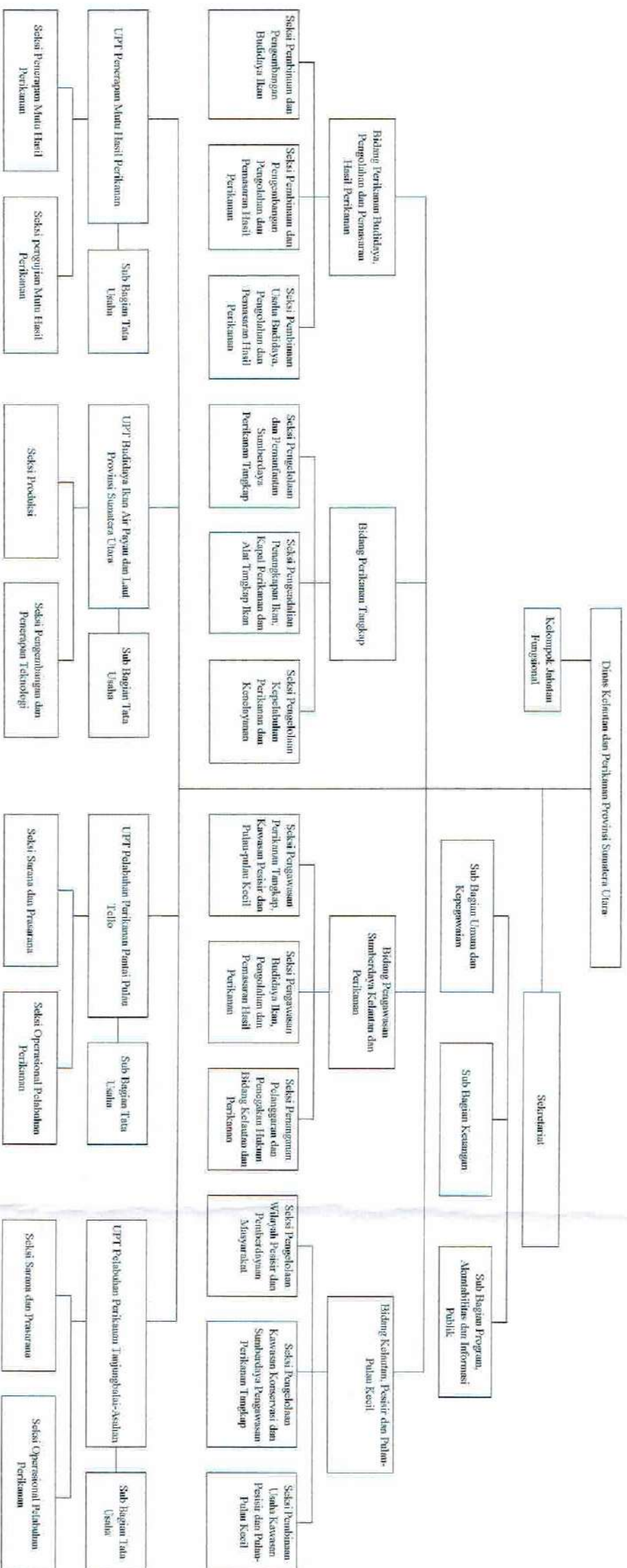
Sedangkan jumlah ASN berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Eselon II sebanyak 1 Orang
2. Eselon III sebanyak 9 Orang
3. Eselon IV sebanyak 15 Orang
4. Fungsional Penyetaraan 12 Orang

TABEL 1.3



Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara



Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Utara

MELXANDER KATITRANG, S.Pi, M.Si
MUBINA TINGKAT I
Np. 19701025 199703 1 003

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara berpedoman kepada:

1. RENSTRA Tahun 2019-2023
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) periode Tahun 2019-2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

VISI DAN MISI

Dalam penyusunan RENSTRA OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu:

• **"Sumatera Utara
Yang Maju,
Aman dan
Bermartabat"**



BAB II PERENCANAAN KINERJA



Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/ lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Penjelasan makna atas pernyataan visi dimaksud adalah:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/ lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Dalam upaya mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara menjalankan Misi pertama sebagai berikut:



"Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat Dalam Kehidupan"

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan serta harga-harga yang terjangkau.

Berdasarkan hal tersebut, target Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Indikator Kinerja Utama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan masing-masing diuraikan dengan indikator kinerja kegiatan dengan tingkat pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan.

SASARAN STRATEGIS



BAB II PERENCANAAN KINERJA



2.2 TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET-TARGET TAHUN 2021

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Pelayanan : “Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Sub Sektor Perikanan” dengan indikator tujuan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%).
2. Berkaitan dengan kesekretariatan : “Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan” dengan indikator tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat (angka).

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan, indikator sasaran : Produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan Nilai Tukar Nelayan/pembudidaya (Angka)
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan, Indikator sasaran : Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan (%)
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran : Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah indikator sasaran : Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)

BAB II PERENCANAAN KINERJA



TABEL 2.2 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TUJUAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN 2020	TARGET CAPAIAN 2021	TARGET CAPAIAN 2022
Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Sub Sektor Perikanan		Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan	Persen (%)	6,20	6,40	6,80
	Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	804.898,54	634.701,24	655.242,20
		-Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	560.559,54	433.032,24	446.023,20
		-Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	244.339	201.669	209.219
		Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Thn)	45,57	46,91	48,34
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen (%)	101	102	103
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Persen (%)	102	103	104



BAB II PERENCANAAN KINERJA



MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA

TARGET
TAHUN 2022

PERIKANAN TANGKAP :
446.023,2 TON

PERIKANAN BUDIDAYA:
209.219 TON



BAB II PERENCANAAN KINERJA



Dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan tersebut, pada tahun 2022 telah ditetapkan 6 (Enam) Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. Dan dalam mendukung tercapainya program tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 2.2.1 ANGGARAN APBD TAHUN 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.981.683.803
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.566.442.983
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	13.597.644.390
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.454.982.441
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.411.374.110
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.176.140.273
	TOTAL	55.188.268.000

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Pada tahun 2022, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan dana P.APBD sebesar Rp. 1.502.903.139,-. Tambahan dana tersebut merupakan dana untuk pelunasan utang pengadaan kapal pengawasan di tahun 2021 yang belum terbayarkan. Adapun rincian tambahan dana P. APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2.2 ANGGARAN P. APBD TAHUN 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.970.027.896
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.597.250.908
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	11.997.825.667
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.618.071.074
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.437.412.750
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.070.582.844
	TOTAL	56.691.171.139

BAB II PERENCANAAN KINERJA



2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perencanaan kinerja yang menghasilkan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara yang disusun pada awal Tahun Anggaran 2022. Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu dokumen yang menyajikan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 disusun setelah ditandatanganinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang mencantumkan Target Kinerja yang akan diperjanjikan untuk dicapai dari masing-masing Sasaran Strategis yang dilaksanakan pada kurun waktu Tahun Anggaran 2022. Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penyempurnaan indikator kinerja sebagai tolak ukur tingkat kinerja OPD, sekaligus untuk memenuhi kriteria Indikator Kinerja yang baik sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 dan Indikator Kinerja tersebut telah diatur dan ditetapkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2015.

Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara akan menguraikan tentang Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penyajian Perjanjian Kinerja ini, akan menjelaskan tentang Target Kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu pada Tahun Anggaran 2022.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Selain itu, dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana Penetapan Kinerja tersebut pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan ikatan janji untuk mencapai target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Tujuan khusus dari Perjanjian Kinerja, antara lain yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Sebagai wujud nyata atas komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
3. Sebagai dasar penilaian atas keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan mengacu kepada Visi dan Misi organisasi yang telah dirumuskan dan ditetapkan pada Dokumen Perencanaan Strategis.
4. Sebagai tolak ukur untuk evaluasi kinerja
5. Sebagai dasar dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment).

Perjanjian kinerja itu sendiri dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 sebagai yang terlampir pada Lampiran I Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun 2022 ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga akan dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja organisasi pelapor. Tujuan dan Sasaran sudah tentu terlebih dahulu dituangkan dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini yaitu dokumen RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023.



Selain dari pada itu terkait dengan akuntabilitas kinerja dan untuk mengukur tingkat capaian kinerja, maka target indikator diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan terkait dengan IKU seyogyanya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Kepala OPD, karena IKU berlaku selama 5 (lima) tahun bersamaan dengan periode RENSTRA.

Tingkat Capaian Kinerja diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, setiap instansi wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah Dinas kelautan dan perikanan provinsi Sumatera Utara ini disusun guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana strategis 2018 - 2023. Laporan kinerja instansi pemerintah dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera utara ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2022. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan/proyek meliputi Indikator masukan (Input), keluaran (Output), hasil (Outcome), manfaat (Benefit) dan dampak (Impact).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

SKALA PENGUKURAN KINERJA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS I



MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA



Sasaran ini dimasukkan untuk meningkatkan produksi hasil perikanan tangkap, yaitu penangkapan ikan dilaut dan diperairan umum (danau, waduk, rawa dan sungai) serta meningkatkan produksi perikanan budidaya (budidaya air tawar, air payau dan laut).

Berdasarkan estimasi potensi sumberdaya ikan diketahui bahwa di wilayah perairan Samudera Hindia (WPP 571) dengan potensi sebesar 841.200 ton, tingkat pemanfaatannya dikategorikan sudah penuh yakni ± 60 persen dan wilayah perairan Selat Malaka (WPP 572) dengan potensi tingkat pemanfaatannya telah mencapai sebesar 760.524 ton. Produksi perikanan tangkap tiap tahunnya fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi banyak faktor salah satunya faktor cuaca.

Berdasarkan Permen KP Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; di WPPNRI 571 sebesar 425.444 ton dan di WPPNRI 572 sebesar 1.240.975 ton.

Adapun Total Jumlah Kapal Penangkapan Ikan sebanyak 34.550 unit, terdiri di Perairan Selat Malaka sebanyak 24.560 Unit dan di perairan Samudera Hindia sebanyak 9.990 Unit.

Total Jumlah Alat Penangkapan Ikan sebanyak 51.616 unit. Terdiri di Perairan Selat Malaka sebanyak 32.186 Unit. Sedangkan di perairan Samudera Hindia sebanyak 19.430 unit

Tolak ukur capaian Sasaran Strategis Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan, terdiri dari 7 (tujuh) indikator yaitu :

1. Produksi perikanan (ton/tahun),
2. Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)
3. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
4. Nilai Tukar Pembudidaya (NTP)
5. Kawasan Konservasi Perairan (Hektar)
6. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang (m²)
7. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove (Hektar)

TABEL 3.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	655.242,2	667.517,2	101,87	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP
-Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	446.023,2	449.571,7	100,80	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP
-Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	209.219	217.945,5	104,17	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP
Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Thn)	48,34	49,15	101,68	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen (%)	103	108,5	105,34	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP
Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Persen (%)	104	97,91	94,14	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP
Kawasan Konservasi Perairan	Hektar (Ha)	25.000	3.762,07	15,05	Sangat Rendah	Data Statistik DisKP
Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	Meter Persegi (m2)	72.031	72.150	100,17	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP
Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	Hektar (Ha)	42	48	114,29	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP

TABEL 3.2
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	PERSEN TASE (%)	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE (%)	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE (%)
Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	804.898,54	647.654,92	80,46	634.701,24	647.654,92	102,04	655.242,2	667.517,2	101,87
-Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	560.559,54	420.419,65	75,00	433.032,24	420.419,65	97,09	446.023,2	449.571,7	100,80
-Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	244.339	227.235,27	93,00	201.669	227.235,27	112,68	209.219	217.945,5	104,17
Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Thn	45,57	45,50	99,85	46,91	45,5	96,99	48,34	49,15	101,68
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen (%)	101	99,51	98,52	102	100	98,04	103	108,5	105,34
Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Persen (%)	102	95,13	93,26	103	95,47	92,69	104	97,91	94,14
Kawasan Konservasi Perairan	Hektar (Ha)	25.000	129.368,29	517,47	25.000	-	-	25.000	3.762,07	15,05
Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	Meter Persegi (m2)	52.031	33.010	63,44	52.031	-	-	72.031	72.150	100,17
Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	Hektar (Ha)	39	42	107,69	39	41	105,13	42	48	114,29

TABEL 3.3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022
DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	TARGET AKHIR RENSTRA 2023	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	667.517,2	676.399,89	98,69	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP
-Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	449.571,7	459.403,89	97,86	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP
-Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	217.945,5	216.996	100,44	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP
Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Thn)	49,15	49,79	98,71	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen (%)	108,5	104	104,33	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP
Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Persen (%)	97,91	105	93,25	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP
Kawasan Konservasi Perairan	Hektar (Ha)	3.762,07	25.000	15,05	Sangat Rendah	Data Statistik DisKP
Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	Meter Persegi (m2)	72.150	102.031	70,71	Sedang	Data Statistik DisKP
Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	Hektar (Ha)	48	45	106,67	Sangat Tinggi	Data Statistik DisKP

TABEL 3.4
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022
DIBANDINGKAN TARGET NASIONAL

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2022	TARGET NASIONAL 2022	CAPAIAN (%)	KATEGORI	SUMBER DATA
Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Thn)	49,15	59,53	82,56	Tinggi	Data Statistik KKP

Pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan menargetkan Angka Konsumsi Ikan nasional tahun 2022 sebesar 59,53 kg/kapita/tahun. Sedangkan target angka konsumsi ikan provinsi Sumatera Utara tahun 2022 sebesar 48,34 kg/kapita/tahun. Dengan capaian realisasi tahun 2022 sebesar 49,15 kg/kapita/tahun atau sebesar 82,56% dari target nasional yang telah ditetapkan. Konsumsi ikan perlu terus didorong karena ikan memiliki kandungan gizi, seperti Omega 3 yang mendukung pertumbuhan. Ikan pun sudah disepakati pemerintah sebagai bahan pangan yang mengandung sumber protein yang penting untuk asupan gizi. Karena itu, konsumsi ikan juga terus didorong untuk membantu menurunkan prevalensi stunting. Oleh karena itu, diadakannya kegiatan yang menjadi pendorong pencapaian target tersebut, salah satunya adalah Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Lomba Masak serba Ikan, serta Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkanas). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan dengan mengingatkan masyarakat dan pemerintah pusat maupun daerah, juga komunitas mengenai pentingnya mengonsumsi ikan. Karena Konsumsi ikan tidak hanya untuk kesehatan tapi juga menjadi investasi yang cukup untuk membangun atau menghasilkan generasi muda yang menjadi generasi emas.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Produksi Perikanan Sumatera Utara Tahun 2022 sebesar 667.517,2 ton atau 101,87 % dari target 655.242,20 ton yang telah ditetapkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada Kegiatan Strategis Daerah dimana Kegiatan Strategis Daerah Diskp yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan perikanan Budidaya. Dan apabila dibandingkan dengan Produksi Perikanan Sumatera Utara tahun 2021 sebesar 647.654,92 ton atau 102 % dari target 634.701,24 ton yang telah ditetapkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Kenaikan jumlah produksi perikanan Sumatera Utara disebabkan adanya bantuan yang diberikan Provinsi Sumatera kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan Sumatera Utara sehingga produksi perikanan dapat meningkat. Pada awal tahun 2020 yang lalu, dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Sumatera Utara, dimana produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya mengalami penurunan yang sangat signifikan sehingga target pada tahun 2020 tidak tercapai.

Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 449.571, 70 ton atau 107,9 % dari target produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 446.023,20 ton dibandingkan dengan Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebesar 439.657, 60 ton atau 101,53 % dari target produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebesar 433.032,24 ton. Tercapainya produksi perikanan tangkap dikarenakan adanya bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Nelayan di Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan sebagai stimulus akibat dampak Covid-19 dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap dan juga Nilai Tukar Nelayan yang diharapkan di atas 100, sehingga dapat dikatakan bahwa nelayan berhasil menjalankan usaha perikanan tangkapnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

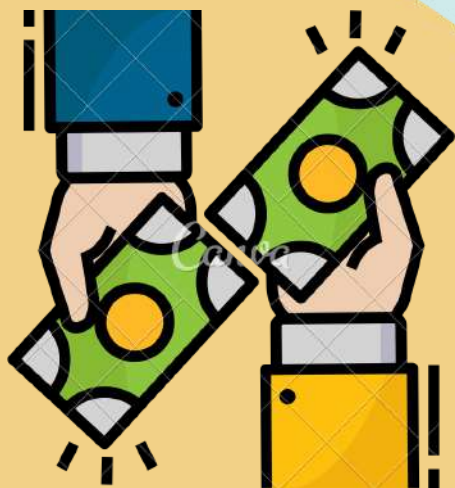
Bantuan yang diberikan kepada nelayan berupa : Bantuan alat penangkapan ikan; Bantuan mesin kapal; Bantuan kapal perikanan; Pengadaan Rumah Ikan; Restocking Perairan umum; Bantuan sampan dayung/solu dan Bantuan Coolbox. Bantuan-bantuan tersebut yang diberikan kepada nelayan Sumatera Utara tersebut telah berhasil meningkatkan produksi perikanan tangkap. Diharapkan dengan anggaran yang meningkat ditahun berikutnya, nelayan penerima bantuan juga dapat meningkat sehingga produksi perikanan tangkap lebih meningkat.

Realisasi produksi perikanan budidaya Sumatera Utara pada tahun 2022 sebesar 217.945,5 ton atau 104,1 % dari target yang ditetapkan pada perubahan RPJMD 2019–2023 Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan Realisasi produksi perikanan budidaya Sumatera Utara pada tahun 2021 sebesar 214.135,64 ton atau 106,18 % dari target yang ditetapkan pada perubahan RPJMD 2019–2023 Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi capaian produksi tersebut yaitu, bantuan benih ikan dan benur udang kepada pembudidaya ikan dan udang serta pemberian bantuan pakan ikan/udang kepada pelaku usaha budidaya ikan di beberapa kabupaten/kota Sumatera Utara.

Capaian angka konsumsi ikan Sumatera Utara tahun 2022 mencapai 49,15 Kg/kapita/Tahun dibandingkan dengan Capaian angka konsumsi ikan Sumatera Utara tahun 2021 mencapai 47,84 Kg/kapita/Tahun. Capaian ini selaras dengan kenaikan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai sumber protein yang berbahan baku ikan. Angka konsumsi ikan ini dapat tercapai disebabkan karena asupan protein dalam meningkatkan imun tubuh masyarakat sangat diperlukan. Jumlah konsumsi ikan tahun 2022 meningkat bila dibandingkan dengan angka konsumsi ikan masyarakat dikarenakan kampanye yang terus digalakkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang merupakan program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Nilai Tukar Nelayan tahun 2022 mencapai angka 108,55 dibandingkan dengan Capaian Nilai Tukar Nelayan tahun 2021 mencapai angka 107,99 %. Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Secara definitif, Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) yang dinyatakan dalam bentuk persentase. $NTN = 100$ memiliki arti bahwa kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi sehingga nelayan mengalami impas. $NTN < 100$, kenaikan harga produksi lebih rendah dari kenaikan harga konsumsi, pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit. Tahun 2022 NTN mencapai angka 108,55 tumbuh sekitar 8,55% artinya nelayan memiliki daya beli yang membaik. Hal ini merupakan hasil dari rangkaian bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan sehingga usaha perikanan tangkap dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan atas usahanya tersebut. Capaian Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Tahun 2021 tidak dapat mencapai target sebesar 103% hanya sebesar 95,47%. Hal ini disebabkan harga pakan yang terus naik sedangkan harga jual ikan yang rendah.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Adapun kunci keberhasilan atau peningkatan kinerja yang mendukung Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada perubahan RPJMD yaitu:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu secara berkesinambungan memberikan bantuan kepada nelayan berupa bantuan alat penangkapan ikan, bantuan mesin kapal, bantuan kapal perikanan, pengadaan rumah ikan, restocking perairan umum, bantuan sampan dayung/solu dan bantuan coolbox. Bantuan-bantuan tersebut yang diberikan kepada nelayan Sumatera Utara tersebut telah berhasil meningkatkan produksi perikanan tangkap.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu juga memberikan bantuan benih ikan dan benur udang kepada pembudidaya ikan dan udang serta pemberian bantuan pakan ikan/udang kepada pelaku usaha budidaya ikan di beberapa kabupaten/kota Sumatera Utara sehingga hal ini juga menyebabkan keberhasilan peningkatan produksi perikanan budidaya.
3. Peningkatan Capaian angka konsumsi ikan Sumatera Utara selaras dengan kenaikan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai sumber protein yang berbahan baku ikan. Angka konsumsi ikan ini dapat tercapai disebabkan karena asupan protein masyarakat yang meningkat dalam menjaga dan meningkatkan imun tubuh. Selain itu, adanya kegiatan kampanye yang terus digalakkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
4. Tahun 2022 NTN tumbuh sekitar 8,55% artinya nelayan memiliki daya beli yang membaik. Hal ini merupakan hasil dari rangkaian bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan sehingga usaha perikanan tangkap dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan atas usahanya tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai keberhasilan tersebut juga mengalami permasalahan-permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Harga ikan yang mengalami penurunan, biaya operasional yang semakin tinggi, hasil perikanan tangkap yang sulit untuk dijual karena terbatasnya akses transportasi.
2. Karena adanya kondisi cuaca yang buruk yaitu musim gelombang yang terjadi cukup lama disertai dengan angin kencang hal ini menjadikan nelayan tidak berani melaut karena berisiko tinggi.
3. Fasilitas sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tangkap tidak memadai (fasilitas pada pelabuhan perikanan).
4. Harga pakan ikan yang tinggi.
5. IUU Fishing yang masih terus terjadi di perairan laut.
6. Kurangnya kesadaran pelaku usaha pengolah hasil perikanan untuk membuat Sertifikat Kelayakan Pangan

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara atas permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 adalah:

1. Perlunya perbaikan fasilitas sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tangkap
2. Perlunya penguatan permodalan dan pemasaran terhadap produk perikanan agar harga ikan tetap stabil
3. Perlunya penguatan kualitas SDM melalui kegiatan bimbingan teknis/ pelatihan, pemberian sertifikat kelayakan pangan tentang pengolahan ikan bagi pelaku usaha pengolah hasil perikanan
4. Memberikan bantuan berupa alat tangkap kepada nelayan dan bantuan benih dan pakan kepada para pembudidaya.
5. Perlunya dilakukannya promosi tentang gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan, agar menimbulkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan sehingga meningkatkan angka konsumsi ikan dan produksi perikanan.
6. Perlunya menumbuhkan kesadaran pembudidaya ikan untuk mulai membuat pakan ikan mandiri

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja anggaran adalah berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA dan DPPA APBD tahun 2022. Adapun jumlah APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 adalah sebesar **Rp 55.188.268.000** dan anggaran P.APD sebesar **Rp 56.691.171.139** dan terealisasi sebesar **Rp 55.782.570.843,91** atau mencapai 98,40 % dengan rincian sebagai berikut:

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG



Belanja tidak langsung digunakan untuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS sebesar **Rp 20.770.784.926** dan terealisasi sebesar **Rp 20.202.455.571** atau sebesar 97,26%.

2. BELANJA LANGSUNG



Belanja langsung sebesar **Rp 35.920.386.213** dan terealisasi sebesar **Rp 35.580.115.272,91** atau sebesar 99,05%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA (EFEKTIVITAS)
DAN PENYERAPAN ANGGARAN (EFISIENSI)
TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			PENYERAPAN ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
Produksi Perikanan (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	655.242,2	667.517,2	101,87	-	-	-
-Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	446.023,2	449.571,7	100,80	14.435.238.417	14.290.593.947	98,99
-Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	(Ton/Tahun)	209.219	217.945,5	104,17	5.618.071.074	5.575.569.868	99,24
Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Thn)	48,34	49,15	101,68	1.070.582.844	1.067.058.169	99,67
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen (%)	103	108,5	105,34	-	-	-
Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Persen (%)	104	97,91	94,14	-	-	-
Kawasan Konservasi Perairan	Hektar (Ha)	25.000	3.762,07	15,05	230.169.000	221.468.975	96,22
Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	Meter Persegi (m2)	72.031	72.150	100,17	450.016.983	448.340.675	99,63
Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	Hektar (Ha)	42	48	114,29	917.064.925	915.825.847	99,86

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan prioritas pada Program yang merupakan urusan kelautan dan perikanan pada RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tersusunnya perubahan materi teknis perairan pesisir rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Sumatera Utara. Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wewenang pemerintah provinsi. Dengan demikian ketiadaan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K menjadi salah satu penghambat investasi karena seluruh izin investasi di daerah akan ditangguhkan karena Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum untuk pengelolaan ruang laut. Sementara itu, Pemerintah Daerah yang telah memiliki perda mengenai RZWP3K ini perlu memperhatikan aspek pengendalian pemanfaatan ruang perairan pesisir dan laut agar sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan. Anggaran untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 626.635.000 dan terealisasi sebesar 626.502.656 atau sebesar 99,98%. Hasil dari kegiatan ini adalah Dokumen Peta dan Materi teknis.

2. Penetapan Kawasan Konservasi Daerah

Tersedianya dokumen rencana pengelolaan zonasi kawasan konservasi perairan untuk ditetapkan menjadi penetapan peraturan menteri kelautan dan perikanan RI, yaitu Pulau Salah Nama Kab. Batubara seluas 3.802,42 Ha). Dengan Anggaran sebesar Rp 230.169.000,- dan Terealisasi sebesar Rp 221.468.975,- atau 96%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3. Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang

Kegiatan ini bertujuan untuk merehabilitasi ekosistem terumbu karang sebanyak 265 Blok semen yang dilaksanakan di Pulau Kalimantan Kabupaten Tapanuli tengah dengan anggaran sebesar Rp 143.246.969,-

4. Rehabilitasi Ekosistem Mangrove

Kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove ini bertujuan untuk merehabilitasi lahan mangrove seluas 6 Hektar sebanyak 20.000 Batang. Kegiatan ini telah dilaksanakan di kabupaten deli serdang, nama penerima Kelompok Tani Hutan Hijau Mekar Desa Bagan Serdang, Kec. Pantai Labu Kab. Deli Serdang, dengan anggaran sebesar Rp 93.842.000,-

5. Monitoring Kesehatan Karang

Kegiatan Monitoring Kesehatan Karang telah dilaksanakan di Kab. Nias, Nias Utara dan Nias Barat. Dengan cara memonitoring terumbu karang yang ada didasar perairan oleh para tenaga ahli menyelam dengan memantau kesehatan karang, apakah tumbuh dengan baik atau terjadi kerusakan karang akibat pengeboman ikan atau penangkapan ikan, sehingga akan tersedianya baseline data dan dokumen kesehatan terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 133.310.514,-

6. Gerakan Bersih Pantai

Gerakan bersih pantai ini adalah sebagai bentuk penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai dan laut. Kegiatan ini diikuti oleh 100 Orang dan dilaksanakan di Kab. Batubara dan Kab. Tapanuli Tengah dengan anggaran sebesar Rp 79.617.500,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

7. Mata Pencaharian Alternatif

Terlaksananya kegiatan Mata Pencaharian Alternatif berupa bantuan benih ikan lele dan pakan untuk 2 Kabupaten, yaitu Kab. Langkat (KUB Nelayan Harapan Maju, Kec. Secanggang) dan Kab. Serdang Bedagai (Kelompok Nelayan Kakap Putih Dusun III Desa Nagalawan, Kec. Perbaungan) dengan anggaran sebesar Rp 176.030.925,-

8. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di luar minyak dan gas bumi

Terlaksananya kegiatan survey untuk penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di Provinsi Sumatera Utara. Adapun anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 114.399.000,-

b. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

1. Pelaksanaan Patroli Rutin Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pesisir Sumatera Utara

Pelaksanaan Patroli Rutin Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Pesisir Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera Utara dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan nelayan penangkap ikan terhadap peraturan perundang-undangan bidang perikanan yang berlaku. Adapun pelaksanaan patroli rutin ini adalah di sepanjang pantai barat dan pantai timur Sumatera Utara, dengan anggaran sebesar Rp 664.549.156,-

2. Pemulangan Nelayan Yang tertangkap di Luar Negeri

Penjemputan nelayan melintas batas yaitu nelayan yang ditangkap oleh Agen Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) karena masuk ke wilayah perairan Malaysia di Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Adapun anggaran untuk pemulangan nelayan tersebut sebesar Rp 16.000.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

c. Program Pengelolaan Budidaya Perikanan

1. Bantuan Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Gurame

Bantuan ini diserahkan kepada kelompok penerima bantuan Di Kabupaten Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuhan Batu Selatan. Kelompok penerima bantuan ini yaitu: Kelompok sri wigati, gurame sejahtera, kenanga, kiat berkah farm dan silima lestari berupa Benih Gurami 30 000 ekor dan Pakan 4.300 Kg. Adapun anggaran dalam pemberian bantuan benih dan pakan ini sebesar Rp 182.570.000,- .

2. Bantuan Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Lele

Di Kabupaten Serdang Bedagai, Asahan dan Tapanuli Tengah. Nama Kelompok penerima bantuan ini yaitu: Kelompok Langgeng Bersama, Sumber Rizky, Dosroha, Berkah, Hidup Maju Bersama berupa Benih Lele sebanyak 60.000 ekor dan Pakan 1500 Kg dengan anggaran sebesar Rp 81.750.000.-

3. Bantuan Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Baung

Penerima bantuan ini Kelompok adalah Teratai Bina Karya Di Labuhan Batu Selatan yaitu berupa bantuan Benih Baung sebanyak 15.000 ekor Pakan 1000 Kg) dengan anggaran sebesar Rp 44.500.000,-

4. Bantuan Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Mas

Penerima bantuan ini adalah Kelompok Menyabar saba julu, Manyabar Aek Kitang, Saba Padang Galugur, Makmur Mina Jaya, Dame Marsada Roha, Karya Bersama, Ringgas Mangula saba, Aek Mas, Mas Tapan Nauli Di Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Utara yaitu berupa Benih Ikan Mas sebanyak 79.875 ekor dan Pakan 1980 Kg dengan anggaran sebesar Rp 125.00.000,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

5. Bantuan Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Kerapu

Diserahkan kepada kelompok Tani Maju Pelawi Berkarya, Koperasi Perikanan Bina Usaha Nelayan Di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang dan Batubara yaitu bantuan benih ikan kerapu sebesar 7.200 ekor dan pakan 1.000 Kg dengan anggaran sebesar Rp 103.390.000,-

6. Bantuan Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Kakap Putih

Diserahkan kepada kelompok Keramba Mandiri, Sehati Jaya di kabupaten Langkat dan serdang bedagai berupa Benih Ikan Kakap sebanyak 5.000 Ekor dan Pakan 1.000 Kg dengan anggaran sebesar Rp 52.000.000,-

7. Bantuan Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Nila

Bantuan pengembangan ini diserahkan kepada kelompok Koperasi Usaha Bersama, Maju Bersama, Saroha, Rap Ikaha di Kab. Deli Serdang dan Samosir yaitu Berupa Benih Nila sebanyak 40.000 ekor dan pakan 2.000 Kg dengan anggaran Rp 69.500.000,-

8. Bantuan Pengembangan Usaha Budidaya Udang Vanname

Bantuan ini diserahkan kepada kelompok Peluh Padat Karya, Koperasi Budidaya Makmur Bersama di Kab Deli Serdang dan Batubara berupa benur udang sebanyak 900.000 ekor dan Pakan 2.380 kg dengan anggaran sebesar Rp 112.310.000,-

9. Bantuan Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Kerapu

Bantuan ini diberikan kepada kelompok Kompak Bersahabat di Kab. Batubara berupa Benih Ikan Kerapu dan Pakan dengan anggaran sebesar Rp 197.000.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1. Pengadaan Rumah Ikan

Bantuan ini dilaksanakan di Kab. Langkat. Kegiatan pengadaan rumah ikan memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 150 unit dari target sebanyak 150 unit dan persentase capaian anggaran sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 746.586.000,- dari total anggaran sebesar Rp 746.586.000,-

2. Bantuan Sampan Dayung/ Solu Bagi Nelayan di Perairan Danau Toba

Bantuan sampan ini diserahkan kepada kelompok di Kab. Humbang Hasundutan (10 Unit), Kab. Dairi (5 Unit), Kab. Samosir (19 Unit) dan Tapanuli Utara (6 Unit) dengan total sebanyak 40 Unit. Memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 40 Unit dari target sebanyak 40 Unit dengan anggaran sebesar 197.136.000,-

3. Restocking Di Perairan Umum Daratan/ Lubuk Larangan

Kegiatan Restocking di Perairan Umum Daratan/ Lubuk larangan dilaksanakan di Kab. Dairi, Humbang hasundutan, Simalungun, Tapanuli Utara dan samosir. Memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 175.000 ekor ikan dari target sebanyak 175.000 ekor ikan dan persentase capaian anggaran sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 198.750.000,- dari total anggaran sebesar Rp 198.750.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

4. Pengadaan Coolbox

Adapun penyerahan bantuan berupa coolbox di Kota Gunung Sitoli (25 Unit), Nias (25 Unit), Nias Barat (25 Unit), Nias Selatan (25 Unit), dan Nias Utara (61 Unit). Dan memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 161 unit dari target sebanyak 161 Unit dan persentase capaian anggaran sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 145.291.230,- dari total anggaran sebesar Rp 145.291.230,-

5. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan

Bantuan ini diserahkan kepada kelompok penerima bantuan yang ada di Kab. Serdang Bedagai (7 KUB sebanyak 150 Unit), Batubara (10 Kelompok sebanyak 260 Unit), Mandailing Natal (5 Kelompok sebanyak 250 Unit) KAB. Asahan (18 Kelompok sebanyak 360 Unit), Labuhan Batu Utara (2 Kub Sebanyak 100 Unit). Kegiatan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan ini memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 1.120 unit dari target sebanyak 1.120 unit dan persentase capaian anggaran sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.087.250.660,-

6. Pengadaan Sampan Bermotor

Bantuan ini diserahkan kepada kelompok penerima bantuan yang ada di Kab. Asahan (4 Unit), Kota Tanjung Balai (2 Unit), Kab. batubara (8 Unit). Kegiatan Pengadaan Sampan bermotor ini memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 14 unit dari target sebanyak 14 unit dengan anggaran sebesar Rp 193.473.000,-

7. Pengadaan Mesin Kapal Perikanan

Bantuan ini diserahkan kepada kelompok penerima bantuan yang ada di Kab. Tapanuli Tengah sebanyak 20 Unit. Persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 20 unit dari target sebanyak 20 Unit dengan anggaran sebesar Rp 538.674.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

8. Pengadaan Sampan Bermotor dan Alat Penangkapan Ikan Bagi Nelayan di Perairan Umum Daratan.

Bantuan ini diserahkan kepada kelompok di Kab Samosir (3 Unit), Tapanuli Utara (2 Unit), Humbang Hasundutan (3 Unit), Dairi (2 Unit), dan Simalungun (4 Unit) dengan total sebanyak 14 Unit. Persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi sebanyak 14 Unit dari target sebanyak 14 unit dan anggaran sebesar Rp 193.473.000,-

9. Restocking Dalam Rangka Pemulihan Sumberdaya Ikan di Danau Toba
Bantuan restocking ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan populasi ikan endemi untuk mengurangi populasi ikan invasif (red devil) di Danau Toba yaitu di Kab. Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Simalungun berupa ikan nila sebanyak 400.000 Ekor. Persentase pencapaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi sebanyak 400.000 Ekor Ikan Nila dari target sebanyak 400.000 Ekor Ikan Nila dengan anggaran sebesar Rp 376.000.000,-

10. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Gillnet Mata 500

Bantuan ini diberikan sebagai pengganti alat tangkap yang dilarang pemerintah. Adapun bantuan ini diberikan kepada kelompok di Kab. Serdang Bedagai sebanyak 42 Unit. Persentase pencapaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi sebanyak 42 Unit dari target sebanyak 42 Unit dengan realisasi anggaran sebesar Rp 127.039.500,-

e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1. Pelaksanaan Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan

Kegiatan Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemar Ikan) dilaksanakan di Kota Binjai, Simalungun dan Tanjung Balai. Kegiatan ini memiliki persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja 3 Kabupaten/ Kota dari target sebanyak 3 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 71.912.000,-

Adapun Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.970.027.896	33.263.713.362,94	97,92
1.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.441.235.710	2.425.779.262,00	99,37
1.1.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.463.916.563	1.460.642.567,00	99,78
1.1.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	977.319.147	965.136.695,00	98,75
1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.813.139.926	20.244.810.571,00	97,27
1.1.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.770.784.926	20.202.455.571,00	97,26
1.1.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.360.000	12.360.000,00	100,00
1.1.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29.995.000	29.995.000,00	100,00
1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	581.570.756	580.074.960,00	99,74
1.1.03.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	470.876.756	469.701.960,00	99,75
1.1.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	110.694.000	110.373.000,00	99,71
1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	560.440.000	546.061.062,00	97,43
1.1.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	174.700.000	168.250.000,00	96,31
1.1.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	241.150.000	237.239.750,00	98,38
1.1.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	144.590.000	140.571.312,00	97,22
1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.934.603.904	1.922.885.702,93	99,39
1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.616.700	60.616.500,00	100,00
1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	746.151.626	740.030.040,00	99,18
1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.119.813	137.850.800,00	98,38
1.1.06.7	Penyediaan Bahan/Material	514.965.600	512.728.582,93	99,57
1.1.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	126.500.000	126.500.000,00	100,00
1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	289.912.000	289.425.780,00	99,83
1.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	56.338.165	55.734.000,00	98,93
1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.922.127.800	1.911.297.045,01	99,44
1.1.07.5	Pengadaan Mebel	200.000.000	198.301.500,00	99,15
1.1.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	368.743.300	368.000.000,00	99,80
1.1.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	509.997.800	506.612.190,00	99,34

1.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	499.997.800	497.239.638,00	99,45
1.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	343.388.900	341.143.717,01	99,35
1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.131.540.300	5.086.494.674,00	99,12
1.1.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52.675.000	44.391.500,00	84,27
1.1.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.160.562.500	1.125.757.406,00	97,00
1.1.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.109.400	219.265.000,00	99,17
1.1.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.697.193.400	3.697.080.768,00	100,00
1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	585.369.500	546.310.086,00	93,33
1.1.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	363.094.500	325.010.086,00	89,51
1.1.09.5	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000,00	100,00
1.1.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	152.275.000	151.300.000,00	99,36
1.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000,00	100,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.597.250.908	1.585.635.497,00	99,27
2.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.306.820.983	1.296.312.306,00	99,20
2.1.01.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	626.635.000	626.502.656,00	99,98
2.1.01.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	230.169.000	221.468.975,00	96,22
2.1.01.3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	450.016.983	448.340.675,00	99,63
2.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	114.399.000	114.398.266,00	100,00
2.1.02.2	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	114.399.000	114.398.266,00	100,00
2.1.03	Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	176.030.925	174.924.925,00	99,37
2.1.03.1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	176.030.925	174.924.925,00	99,37
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	11.997.825.667	11.869.168.913,22	98,93
3.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	4.112.125.310	4.087.413.390,00	99,40
3.1.01.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.596.928.000	1.575.479.230,00	98,66
3.1.01.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.515.197.310	2.511.934.160,00	99,87
3.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.320.421.000	1.296.228.000,00	98,17
3.1.02.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	737.521.000	713.328.000,00	96,72
3.1.02.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	582.900.000	582.900.000,00	300,00

3.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	151.945.000	151.875.000,00	99,95
3.1.03.2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	151.945.000	151.875.000,00	99,95
3.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6.313.334.357	6.233.752.523,22	98,74
3.1.06.1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	88.448.000	88.428.000,00	99,98
3.1.06.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	733.505.500	732.219.562,45	99,82
3.1.06.3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	5.491.380.857	5.413.104.960,77	98,57
3.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	100.000.000	99.900.000,00	99,90
3.1.09.2	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	100.000.000	99.900.000,00	99,90
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	5.618.071.074	5.575.569.867,55	99,24
4.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	140.525.000	140.097.200,00	99,70
4.1.01.1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	66.365.000	66.036.000,00	99,50
4.1.01.2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	74.160.000	74.061.200,00	99,87
4.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	5.477.546.074	5.435.472.667,55	99,23
4.1.05.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.058.566.997	1.046.199.368,55	98,83
4.1.05.3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	665.213.000	665.164.000,00	99,99
4.1.05.4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	811.750.165	809.959.006,00	99,78
4.1.05.5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.006.612.837	1.987.432.718,00	99,04
4.1.05.6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	563.315.575	559.037.575,00	99,24
4.1.05.7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	262.129.500	258.874.500,00	98,76
4.1.05.9	Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	109.958.000	108.805.500,00	98,95
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.437.412.750	2.421.425.034,00	99,34
5.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	2.165.797.350	2.159.132.734,00	99,69
5.1.01.1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	153.438.500	150.131.640,00	97,84

5.1.01.2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	1.847.660.600	1.845.798.494,00	99,90
5.1.01.4	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	164.698.250	163.202.600,00	99,09
5.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas	271.615.400	262.292.300,00	96,57
5.1.02.2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	271.615.400	262.292.300,00	96,57
6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.070.582.844	1.067.058.169,20	99,67
6.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Penetapan Persyaratan dan Prosedur	76.483.000	76.483.000,00	100,00
6.1.01.1	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	76.483.000	76.483.000,00	100,00
6.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	892.553.844	889.897.275,20	99,70
6.1.02.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	404.952.659	404.486.908,20	99,88
6.1.02.2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	487.601.185	485.410.367,00	99,55
6.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	101.546.000	100.677.894,00	99,15
6.1.03.1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	71.912.000	71.043.894,00	98,79
6.1.03.2	Pemberian Insentif dan Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	29.634.000	29.634.000,00	100,00
	<u>TOTAL</u>	56.691.171.139	55.782.570.843,91	98,40

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara



Produksi Perikanan Sumatera Utara tahun 2022 sebesar 667.517,2 ton atau 101,87 % dari target 655.242,20 ton yang telah ditetapkan pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Kenaikan jumlah produksi perikanan Sumatera Utara disebabkan adanya bantuan yang diberikan Provinsi Sumatera kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan Sumatera Utara sehingga produksi perikanan dapat meningkat.

Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 449.571,70 ton atau 107,9 % dari target produksi perikanan tangkap tahun 2022 sebesar 446.023,20 ton.

BAB IV PENUTUP

Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebesar 449.571,7 ton atau 101,53 % dari target produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebesar 433.032,24 ton. Tercapainya produksi perikanan tangkap tahun 2021 dikarenakan adanya bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Nelayan di Sumatera Utara. Bantuan yang diberikan sebagai stimulus akibat dampak Covid-19 dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap dan juga Nilai Tukar Nelayan yang diharapkan di atas 100, sehingga dapat dikatakan bahwa nelayan berhasil menjalankan usaha perikanan tangkapnya. Hal ini jika Dibandingkan dengan capaian produksi perikanan tangkap tahun 2020 yaitu sebesar 420.419,65 ton terjadi kenaikan capaian produksi perikanan tangkap sebesar 2,91%.

Realisasi produksi perikanan budidaya Sumatera Utara pada tahun 2022 sebesar 214.135,64 ton atau 106,18 % dari target yang ditetapkan pada RPJMD 2019-2023 Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi capaian produksi tersebut yaitu, bantuan benih ikan dan benur udang kepada pembudidaya ikan dan udang serta pemberian bantuan pakan ikan/udang kepada pelaku usaha budidaya ikan di beberapa kabupaten/kota Sumatera Utara. Hal ini jika dibandingkan dengan capaian produksi perikanan budidaya tahun 2020 yaitu sebesar 227.235,27 ton terjadi penurunan capaian produksi perikanan budidaya sebesar 5,76%. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut yaitu, harga pakan ikan yang melonjak karena produsen pakan ikan menaikkan harga disebabkan covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan awal tahun 2021 sehingga menyebabkan kekhawatiran pembudidaya ikan dalam pemasaran hasil budidayanya di masa pandemi dan juga menjadi pemicu para pembudidaya tidak melakukan aktivitas budidaya.

BAB IV PENUTUP

Capaian angka konsumsi ikan Sumatera Utara tahun 2022 mencapai 47,84 Kg/kapita/Tahun. Capaian ini selaras dengan kenaikan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebagai sumber protein yang berbahan baku ikan. Angka konsumsi ikan ini dapat tercapai disebabkan karena pandemik Covid-19 yang membutuhkan asupan protein dalam meningkatkan imun tubuh masyarakat. Jumlah konsumsi ikan tahun 2021 meningkat bila dibandingkan dengan angka konsumsi ikan masyarakat dikarenakan kampanye yang terus digalakkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang merupakan program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Capaian Nilai Tukar Nelayan tahun 2022 mencapai angka 107,99 %. Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga. Tahun 2022 NTN mencapai angka 107,99 tumbuh sekitar 7,99% artinya nelayan memiliki daya beli yang membaik. Hal ini merupakan hasil dari rangkaian bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan sehingga usaha perikanan tangkap dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan atas usahanya tersebut.

BAB IV PENUTUP

Adapun Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tangkap tidak memadai (fasilitas pada pelabuhan perikanan), kurangnya bantuan kepada kelompok masyarakat nelayan dan pembudidaya dan fasilitas UPT. Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Diskp
- b. Harga pakan ikan yang tinggi
- c. IUU Fishing yang masih terus terjadi di perairan laut
- d. Perlunya penguatan permodalan dan pemasaran terhadap produk perikanan

Demikian laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan perundang – undangan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULYADI SIMATUPANG, S.Pi, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2022

Pihak Kedua

GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

MULYADI SIMATUPANG, S.Pi, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701025 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	1 PRODUKSI PERIKANAN - Produksi Perikanan Tangkap - Produksi Perikanan Budidaya 2 Tingkat Konsumsi Ikan 3 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 4 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 5 Kawasan Konservasi Perairan 6 Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang 7 Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	(Ton/ Tahun) (Ton/ Tahun) (Ton/ Tahun) (Kg/Kap/Thn) Persen (%) Persen (%) Hektar (Ha) Meter Persegi (m ²) Hektar (Ha)
2	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan		655.242,20 446.023,20 209.219 48,34 103 104 25.000 72.031 42

PROGRAM

	Rp	22.206.584.197
1 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Rp	1.566.442.983
2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp	13.597.644.390
3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp	4.454.982.441
4 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	1.411.374.110
5 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp	1.176.140.273

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

MEDAN, 2022
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

EDY RAHMAYADI

MULYADI SIMATUPANG, S.Pi, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701025 199703 1 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULYADI SIMATUPANG, S.Pi, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 26 Desember 2022

Pihak Kedua

GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI

Pihak Kesatu

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

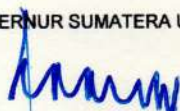
MULYADI SIMATUPANG, S.Pi, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701025 199703 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	1 PRODUKSI PERIKANAN (Ton/ Tahun)	655.242,20
		- Produksi Perikanan Tangkap (Ton/ Tahun)	446.023,20
		- Produksi Perikanan Budidaya (Ton/ Tahun)	209.219
		2 Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	48,34
		3 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Persen (%) 103
2	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	4 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Persen (%) 104
		5 Kawasan Konservasi Perairan	Hektar (Ha) 25.000
		6 Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	Meter Persegi (m ²) 72.031
		7 Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	Hektar (Ha) 42

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Rp 1.597.250.908	P. APBD
2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp 11.997.825.667	P. APBD
3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 5.618.071.074	P. APBD
4 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 2.437.412.750	P. APBD
5 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 1.070.582.844	P. APBD
JUMLAH	Rp 22.721.143.243	

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

MEDAN, 26 Desember 2022
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



MULYATI SIMATUPANG, S.Pi, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701025 199703 1 003